

Kemitraan Sekolah dengan Dunia Kerja: Pengembangan Karir pada Sekolah Lanjutan di Jepang dan Indonesia

Sa'dun Akbar

Abstract: School system is always associated with man power system. School system is a source of human labors, and business enterprises are its users. Most of secondary schools in Japan develops cooperations with the Department of Man Power and other private corporations in recruiting human labors. School system and business enterprises have responsibilities in the field, and they do their best. In Indonesia, school system is separated from the man power system. Relatively, there are no cooperations and links developed by school system and private corporations. Indonesian government has to develop multistrategies in managing human labor through school system of education.

Kata-kata kunci: sekolah, pengembangan karir, kemitraan, dunia kerja.

Masalah ketenagakerjaan dihadapi oleh hampir sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Perbedaan antara negara yang satu dengan yang lain terletak pada intensitas, kompleksitasnya, dan strategi mengatasinya. Sekolah sebagai sumber tenaga kerja tidak terlepas dengan dunia usaha sebagai penggunaannya. Pada tulisan ini dikemukakan bagaimana sekolah-sekolah lanjutan di Jepang mengembangkan kemitraan dengan dunia kerja (Rhodes dan Nakamura, 1996), bagaimana yang terjadi di Indonesia, yang didasarkan atas refleksi sepiintas dari studi referensial, pengamatan, dan pengalaman, serta analisis komparatif terhadap keduanya.

Sa'dun Akbar adalah dosen Jurusan Matakuliah Umum (MKU) FPIPS IKIP MALANG.

DARI SEKOLAH KE DUNIA KERJA DI JEPANG

Seorang peneliti Amerika (Rhodes dan Nakamura, 1996) mencoba mengidentifikasi faktor tanggung jawab yang tinggi pada sekolah-sekolah di Jepang. Fokus perhatiannya diarahkan kepada peranan bimbingan dan konseling. Dengan observasi, diperoleh gambaran yang lebih jelas, misalnya, bahwa sebagian besar siswa di Jepang memilih karir masa depannya dari guru kunjung dan konselor atau guru BP-nya.

Pada umumnya anak muda Jepang segera memasuki dunia kerja setelah lulus dari sekolah lanjutan dengan bantuan langsung dari sekolahnya. Sekolah-sekolah di Jepang dipersyaratkan secara hukum untuk membantu siswa dalam mencari pekerjaannya. Dasar hukumnya adalah *School Education Law 1947* dan *Employment Security Act 1947* serta berbagai peraturan Menteri Pendidikan dan Tenaga Kerja. Peraturan pelaksanaan Undang-undang pendidikan menyatakan bahwa harus ada kepala bimbingan karir pada setiap sekolah di bawah supervisi kepala sekolah. Kepala bimbingan karir ini berupaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memilih sekolah (lanjutan), karir pekerjaan, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas bimbingan karir.

Berkaitan dengan itu, *Employment Security Act* mempersyaratkan pegawai negeri daerah (Pemda/Depnaker) untuk bekerjasama dengan sekolah dalam bimbingan dan konseling bagi siswa. Peraturan itu menyatakan bahwa Kantor Cabang Ketenagakerjaan Daerah bertanggung jawab untuk menerima tawaran pekerjaan dari para majikan pencari tenaga kerja, menerima lamaran kerja dari siswa, mempertemukan siswa pencari kerja dengan pencari tenaga kerja yang potensial, dan melanjutkan bimbingan bagi siswa yang sudah siap lulus.

Secara teoretis, sekolah sebenarnya bebas melakukan tanggung jawab sesuai dengan cara yang mereka pilih. Namun, kenyataannya, hampir semua sekolah di Jepang mengelola bimbingan vokasional dengan cara yang hampir sama.

Seperti dinyatakan di atas, setiap sekolah ada Kepala Bimbingan Karir yang dipilih di antara guru-guru. Kepala Bimbingan Karir itu dibantu oleh guru-guru lain yang secara bersama-sama membentuk Komite Bimbingan Karir (KBK) di sekolah di Jepang, setiap guru menjadi anggota KBK, tanpa kecuali. Komite ini biasanya dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi studi lanjut yang mengurus siswa yang akan studi lanjut dan seksi bimbingan ketenagakerjaan yang membantu siswa untuk memperoleh pekerjaan. Bagian ketenagakerjaan bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan menginformasikan kepada siswa, menemukan lapangan kerja baru bagi siswa dengan kunjungan kepada tempat-tempat kerja yang potensial, mengelola ujian

praktik, dan bekerjasama dengan Kantor Sekuritas Ketenagakerjaan dan perusahaan-perusahaan swasta dalam membantu siswa memperoleh pekerjaan.

Perusahaan-perusahaan di Jepang secara aktif merekrut tenaga kerja dari siswa-siswa SLA sesuai dengan prosedur Kantor Ketenagakerjaan Daerah. Sebelum mereka dapat secara aktif dalam proses, pertama-tama mereka harus mengisi borang tentang kondisi pekerjaan, gaji, layanan kesejahteraan sosial, persyaratan yang diperlukan, dan sebagainya. Isian borang tersebut harus disetujui oleh Kantor Sekuritas Ketenagakerjaan. Majikan perusahaan mengirimkan borang itu ke sekolah, atau mengirimkannya secara pribadi, kemudian kontak langsung dapat dilakukan antara pencari pekerjaan dengan sekolah.

Sambil bekerja pada Komite Bimbingan Karir, para guru kunjung (*home room-teacher*) di Jepang biasanya melayani bantuan-bantuan yang bersifat akademis ataupun sosial kepada kurang lebih 40 siswa di bawah bimbingan selama periode tiga tahun. Kenyataannya mereka melakukan lebih dari itu. Untuk suatu kenaikan pangkat mereka bertanggung jawab atas keberhasilan/kegagalan akademis siswanya. Ketika siswa terancam gagal pada suatu mata pelajaran tertentu, guru kunjung sering berkunjung ke rumah setelah jam pelajaran sekolah, terutama bagi siswa yang kurang mampu mengerjakan. Guru kunjung bertanggung jawab agar mereka tidak gagal baik di bidang akademik maupun bidang lain. Mereka juga mengunjungi rumah para siswanya paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Selama kunjungan, mereka bertemu dengan orang tua siswa dan menjawab pertanyaan sekitar kemajuan anaknya. Mereka memperoleh keuntungan mengetahui kehidupan siswanya, bahkan seringkali minta ijin untuk melihat kamar siswanya. Karena ini berkaitan begitu dekat baik dengan siswa maupun orang tua, para guru kunjung akan mendengar secara langsung dari lingkungan siswa, dan sebagian besar siswa Jepang dengan senang hati menerima layanan tersebut.

Bagaimana siswa menggunakan sumber-sumber sekolah untuk memperoleh pekerjaan? Tahap yang paling sibuk pada bimbingan karir adalah masa liburan sebelum musim panas. Sekolah mulai menerima daftar lowongan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan (sekitar bulan Juli). Anggota Komite Bimbingan Karir mengorganisasikan informasi dari pencari tenaga kerja itu ke dalam daftar yang berisi nama perusahaan, deskripsi tugas, jumlah jabatan yang diperlukan, dan sebagainya. Guru kunjung mendistribusikan daftar itu ke semua siswa yang mencari kerja sebelum masa liburan musim panas. Dari situ siswa dapat memperoleh informasi yang lebih terinci dengan pergi ke Kantor Bimbingan Karir dan membaca daftar aslinya. Mereka juga dapat bertanya kepada anggota komite yang memiliki kontak langsung dengan orang-orang di perusahaan.

Selama liburan, guru kunjung membuat jadwal pertemuan dengan orang tua dan siswa untuk mendiskusikan kemungkinan pekerjaan. Sebelum pertemuan ini, siswa dan orang tua sudah dapat membuat pertimbangan dengan mengacu kepada daftar pekerjaan yang diterima dari komite dengan melihat format aslinya. Dalam pertemuan ini guru kunjung meminta siswa untuk menentukan pilihan pertama dan kedua dari pekerjaan, memberi pandangan, dan kesempatan pekerjaan pada bidang pekerjaan itu.

Setelah liburan siswa mengirim borang dengan pilihan akhir. Komite menggunakan borang itu untuk menentukan apakah siswa diberi rekomendasi sesuai dengan pekerjaan yang dipilih atau tidak. Biasanya perusahaan meminta sekolah untuk merekomendasi sejumlah siswa tertentu untuk tes dan wawancara pekerjaan. Bahkan seringkali juga perusahaan menyewa (membayar) komite bimbingan dan guru kunjung untuk menyeleksi kualifikasi siswa. Siswa sudah diberi informasi tentang kriteria untuk diberi rekomendasi dan telah menyadari bahwa mereka harus melengkapinya. Kriteria itu biasanya meliputi peringkat, partisipasi pada aktivitas kelompok, dan perilaku sehari-hari. Siswa yang tidak dapat direkomendasikan pada pilihan pertama biasanya direkomendasikan pada pilihan kedua.

Pada waktu itu siswa juga diberi arahan tentang cara mengerjakan tes dan sikap ketika wawancara. Tes yang diberikan oleh perusahaan biasanya meliputi Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, dan Matematika (kadang-kadang sains dan ilmu sosial), dan juga tentang kehidupan di sekolah, hobi, dan harapan masa depan. Tes-tes itu diberikan karena perusahaan membutuhkan tenaga yang dapat beradaptasi secara cepat pada perubahan teknologi dan situasi kerja daripada sekadar mementingkan keterampilan. Sebagian pencari tenaga kerja berkeyakinan bahwa pekerja yang memiliki pengetahuan pada mata pelajaran utama dapat lebih menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan kondisi kerja. Oleh karena itu, keterampilan khusus hampir selalu dikembangkan pada pekerjaan (dunia kerja).

Perlu diperhatikan bahwa sekolah selalu menekankan pengembangan untuk berperilaku terus terang, jujur dalam membuat rekomendasi. Jika pada pekerjaan tertentu, misalnya, bakat akademik yang tinggi bisa saja menjadi kurang penting daripada kepribadian yang stabil dan bersahabat. Komite akan menekankan bahwa ketidakjujuran akan merugikan prospek ke pekerjaan bagi siswa di masa depan.

Pekerjaan Komite tidak berhenti sampai di situ. Setelah proses rekrutmen berakhir (siswa sudah diterima), Komite mengirimkan ucapan terima kasih kepada perusahaan karena telah mempekerjakan siswanya. Komite segera me-

nyiapkan siswa pada peran barunya sebagai anggota pekerja dalam suatu masyarakat. Komite juga masih melayani pengembangan karir bagi siswa-siswanya yang bekerja pada suatu perusahaan. Para pendidik di Jepang menekankan nilai-nilai yang harus disadari siswa untuk menjadi orang dewasa sebagai anggota masyarakat.

Sebuah survei pada 30 sekolah terhadap sejumlah 6657 siswa yang lulus pada Maret 1994 menunjukkan bahwa 2237 (33,6%) dari jumlah tersebut adalah pencari kerja. Dari siswa yang mencari kerja itu sebanyak 2209 (98,7%) telah mendapatkan pekerjaan, bahkan selama resesi ekonomi. Menurut survei, sejumlah 1964 siswa (88,9%) mendapatkan pekerjaan pada sektor swasta. Hanya sebagian kecil siswa yang bekerja melalui koneksi keluarga atau bekerja pada perusahaannya sendiri.

SEKOLAH DAN DUNIA KERJA DI INDONESIA

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (1989). Pada pasal 15 dinyatakan bahwa pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah No.29 th.1990 (bab X ps 27, tentang bimbingan) dinyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan, dan bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMU di Indonesia (1994), khususnya tentang pelaksanaan bimbingan karir, ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa pada kelas 1 bimbingan karir bertujuan menilai pola karir dan menjelaskan kemungkinan terjadinya perubahan sewaktu-waktu, menilai perlunya keluasan dalam peranan dan pilihan karir, merencanakan studi lanjutan dan menata tujuan sekolah berdasarkan penilaian diri dan peninjauan karir, mengembangkan kecakapan yang dimiliki berdasarkan pengalaman di masa lalu dan menggunakannya untuk keperluan masa depan. Pada kelas 2, bimbingan karir bermaksud menilai pentingnya penataan tujuan karir yang realistis dan mengarahkan diri pada tujuan itu, mengembangkan keterampilan untuk menghadapi kemungkinan perubahan, mendiskusikan beberapa konflik peranan yang mungkin dialami setelah dewasa, menilai perlunya memiliki legalitas untuk

memperoleh keamanan dan kepastian bekerja. Untuk kelas 3, bimbingan dilakukan dengan menata kembali tujuan-tujuan karir, menelaah hubungan antara peran dalam pekerjaan dan peran dalam keluarga, mempelajari strategi untuk menghadapi diskriminasi dan kecakapan yang dimiliki sekarang dan di masa depan.

Mengacu kepada perundang-undangan, peraturan pemerintah, petunjuk pelaksanaan bimbingan karir tersebut di atas, meski masalah pekerjaan disebutkan, bimbingan karir terkesan masih terlepas dari dunia kerja. Dalam praktiknya, bimbingan karir dilaksanakan lebih cenderung bersifat teoretis, bahwa kisi-kisi itu diajarkan di depan kelas, dan belum ke arah rintisan karir.

Di sekolah-sekolah Indonesia ada layanan bimbingan dan konseling (BP). Pada struktur organisasinya ada koordinator BP dan staf BP dengan jumlah sekitar antara 2 (dua) sampai dengan 6 orang pada setiap sekolah, tergantung besar kecilnya sekolah. Itupun tidak semua berlatar belakang pendidikan psikologi pendidikan, dengan perbandingan rata-rata 1:150.

Dalam praktiknya, layanan bimbingan karir lebih bersifat informatif, itupun lebih pada informasi belajar untuk studi lanjut, dan sangat sedikit informasi tentang ketenagakerjaan. Layanan bimbingan lebih bersifat konseling individual, terutama bagi siswa yang bermasalah. Ada semacam gurauan-ironi yang menganalogikan guru BP dengan polisi sekolah; mereka lebih banyak mengurus siswa-siswa yang bermasalah (terlambat, membolos, berkelahi, dan sebagainya). Diakui juga, tentu banyak guru BP yang dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Dalam dunia BP di Indonesia ada konsep kunjungan rumah. Dalam praktiknya, kunjungan rumah yang dilakukan oleh guru BP terbatas pada kunjungan ke rumah siswa yang bermasalah; tidak semua siswa berkesempatan dikunjungi.

Dalam usaha memperoleh pekerjaan, begitu lulus dari suatu sekolah, para lulusan yang ingin mencari kerja bertebaran mencari kerja sendiri-sendiri, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Ada yang cepat mendapatkan, ada yang lama, bahkan ada yang tidak memperoleh pekerjaan. Data ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan jumlah pengangguran di Indonesia semakin banyak dan meningkat dari tahun ke tahun.

Diakui, ada beberapa sekolah tertentu yang menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, tetapi jumlahnya amat kecil. Itupun sangat tergantung kepada kreativitas pengelolanya, dan kerjasama itu lebih bersifat informatif, belum sistemik. Beberapa politeknik dan sekolah kejuruan ada yang

melakukannya dalam seleksi tenaga kerja, tetapi yang berhasil dalam seleksi dan dapat diterima sebagai pekerja sangat sedikit.

Pendidikan sistem ganda (PSG) dalam kerangka *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha juga telah diujicobakan pada beberapa sekolah kejuruan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Bukit (1997) pada STM 5 dan PT Pindad Persero Bandung menemukan bahwa pihak sekolah dan industri telah melakukan upaya yang serius untuk menerapkan PSG. Penerapan program PSG di STM 5 Bandung telah memberi suasana baru bagi sekolah. Kegiatan PSG di sekolah belum banyak menyentuh pembelajaran di kelas, kegiatan sekolah masih terfokus pada pencarian industri sebagai tempat praktik. Guru-guru mengalami kesulitan menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Mereka kurang menguasai kompetensi industri serta pola pengajaran berdasarkan kompetensi. Sejalan dengan itu masih sangat kecil upaya untuk menerapkan inovasi PSG dalam pembelajaran di sekolah.

Di pihak industri juga telah ditunjukkan langkah-langkah nyata guna menunjang penerapan PSG. Konflik antara sekolah dan industri lebih menonjol pada kepentingan ekonomi daripada aspek kepentingan (biaya PSG amat mahal). Pembimbing siswa di sektor produksi masih mengalami kesulitan mengajar. Mereka umumnya belum menguasai metode mengajar di bengkel. Belum juga ada kejelasan bagaimana kualitas lulusan. Apakah mereka akan segera diterima dalam dunia kerja segera setelah mereka lulus, hal itu masih menjadi tanda tanya besar.

ANALISIS KOMPARATIF

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan di Jepang sama-sama dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam pengkaitan sekolah dengan dunia kerja, berbagai regulasi di Jepang nampak lebih jelas, tegas, dan mendorong kemitraan. Ada distribusi tanggung jawab yang jelas antara sekolah, depnaker dan dunia usaha di Jepang. Kemitraan dalam hal pengadaan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja menjadi sesuatu yang biasa bagi sekolah, depnaker, dan dunia kerja di Jepang. Kemitraan semacam itu tidak terjadi di Indonesia. Implikasinya, para lulusan sekolah menengah di Jepang lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena telah terbimbing sejak di bangku sekolah. Para lulusan sekolah di Indonesia pada umumnya masih harus mencari kerja sendiri.

Dalam hal orientasi ke pekerjaan, di Indonesia dan di Jepang sama-sama dikelola oleh tim bimbingan dan konseling. Di Jepang ada Komite Bimbingan

Karir, di Indonesia ada staf Bimbingan dan Penyuluhan. Rasio konselor-siswa berbeda, dan peran-peran yang dilakukan relatif berbeda. Jika didasarkan pada peraturan yang ada, kemampuan pengantaran siswa ke dunia kerja, dan implikasi pada peningkatan kualitas pendidikan, sistem dan pelaksanaan bimbingan karir di Jepang lebih baik dari pada di Indonesia.

Peran Komite Bimbingan dan Konseling (termasuk guru kunjung) yang begitu besar dalam menentukan masa depan siswa (khususnya dengan keterpercayaan rekomendasinya pada dunia kerja) memungkinkan para siswa menjadi lebih patuh kepada guru-gurunya (setiap guru menjadi anggota komite), berpacu mencapai prestasi yang tinggi di sekolah (prestasi menentukan peringkat pekerjaan), kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianggap baik, dan perilaku-perilaku lainnya. Kontrol dari guru kunjung yang sampai mampu "memotret" situasi lingkungan keluarga siswa diduga memiliki implikasi yang positif pada pengembangan kualitas pendidikan. Hal-hal tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Indonesia bukanlah Jepang. Kesenjangan di antara kedua bangsa ini sangat jauh. Jepang merupakan negara industri maju yang berpenduduk kecil, dan mampu melakukan investasi secara besar-besaran baik di dalam maupun di luar negeri pada berbagai sektor usaha sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja yang sangat luas. Perencanaan ketenagakerjaan di Jepang, boleh jadi, lebih sederhana, dan oleh karena itu lebih akurat di Jepang daripada di Indonesia. Penyesuaian-penyesuaian antara sekolah dan perusahaan lebih memungkinkan di Jepang.

Di lain pihak, Indonesia merupakan negara berkembang yang berpenduduk lebih besar dan berkemampuan investasi rendah sehingga kurang mampu menciptakan kesempatan kerja secara luas. Sayangnya, menurut Sumahamidjaja (1980), pola pendidikan yang berlaku di Indonesia cenderung meniru pola pendidikan barat (negara maju) yang kebutuhan pendidikannya berbeda dengan bangsa yang sedang berkembang. Sistem pendidikan barat mempersiapkan manusia-manusia untuk ditempatkan pada pekerjaan. Pekerjaan ini dipersiapkan oleh lapisan industri yang mampu menciptakan pekerjaan secara luas. Akibatnya, lulusan sekolah dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi tercekam oleh pola pikir mencari pekerjaan dan bukan menciptakan pekerjaan.

Di Indonesia, masalah ketenagakerjaan yang dihadapi setidaknya-tidaknya mencakup laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi daripada kesempatan kerja sehingga jumlah pengangguran terdidik terus meningkat, minat dan sikap wiraswasta yang relatif rendah, produktivitas rendah, kompleksnya masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tak kunjung teratasi, dan daya saing

yang rendah. Sekolah sedapat mungkin mengembangkan banyak strategi dalam mengantisipasi persoalan ketenagakerjaan.

Pengembangan sistem bimbingan karir seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Jepang patut dipertimbangkan, terutama bagi sekolah tertentu di daerah tertentu yang mungkin dapat melakukannya. Pengembangan karir alternatif dengan pendidikan kewirausahaan juga penting. Di samping untuk membina sikap mental wirausaha, kata Foreman-Peck (1993), pendidikan kewirausahaan sedapat mungkin difokuskan kepada kemauan berusaha sesuai dengan kebutuhan kini dan mendatang. Pengembangan sekolah dengan sistem ganda perlu terus dibenahi dan menjadi kepedulian dari berbagai pihak. Tidak kalah pentingnya adalah mencoba mengembangkan kurikulum melalui kemitraan sekolah dan dunia usaha (Wika, 1991), yakni kurikulum yang lebih menekankan keberhasilan dalam dunia kerja. Kurikulum ini berisi keterampilan survival dan pemecahan masalah, pengembangan karir dan keterampilan mencari kerja, keterampilan dan kematangan kerja. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan program tambahan yang diperlukan siswa. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Feither, Barbara, dan Frans (1982) menunjukkan bahwa ada implikasi yang signifikan antara konseling, program masa depan dalam perencanaan karir dengan penempatan ke pekerjaan.

KESIMPULAN

Sekolah dan dunia kerja merupakan dua hal yang berkaitan. Sekolah dan dunia usaha perlu mengembangkan kemitraan dalam pengadaan, penempatan, dan pembinaan tenaga kerja. Pengembangan kemitraan antara sekolah, Depnaker dan dunia kerja sudah demikian jauh berkembang di Jepang, bahkan berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Meskipun kondisi di Jepang dan di Indonesia sangat berbeda, tidak ada salahnya sekolah-sekolah tertentu di Indonesia mencoba mengembangkan sistem bimbingan karir seperti yang dilakukan di Jepang, di samping mengembangkan berbagai strategi dalam mengantisipasi berbagai persoalan ketenagakerjaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bukit, M. 1997. *Implementasi Pendidikan Sistem Ganda sebagai Pembaharuan Kurikulum*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah. 1994. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdikbud.

- Feither, Barbara, dan Frans. 1982. *Campus to Career: Bridging the Gap. Journal of College Placement*. Vol.43 No.1.
- Foreman-Peck, L. 1993. *Entreprise Education: A New Social Ethic for Higher Education, Vocational Aspect of Education*, Vol. 45 no.2.
- Rhodes, L. dan Nakamura, M. 1996. *From School to Work in Japan. A Compare (A Journal of Comparative Education)*. Vol.26. No. 3.
- Sumahamidjaja, S. 1980. *Membina Sikap Mental Wiraswasta*. Jakarta: Gunung Jati.
- UU no 2 Th 1989 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wika Jr., E.H. 1991. *School Transition to Employment Partnership*. Makalah dalam *Rural Education Symposium*, Nashvil, March 17-20.